SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENYEDIAAN AKSESIBILITAS DI KABUPATEN MELAWI

Ptogram Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh :

WETTY BRIGITHA
NIM E1032221028

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENYEDIAAN AKSESIBILITAS DI KABUPATEN MELAWI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

WETTY BRIGITHA
NIM E1032221028

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENYEDIAAN AKSESIBILITAS DI KABUPATEN MELAWI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

WETTY BRIGITHA
NIM E1032221028

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Zulkarnaen, M.Si
NIP 196402081988101001

Tanggal : .....

Dosen Pembimbing Pendamping

Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP 198805072014041002

Tanggal : .....

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENYEDIAAN AKSESIBILITAS DI KABUPATEN MELAWI

Oleh :

WETTY BRIGITHA
NIM E1032221028

Dipertahankan di	:	Pontianak
Pada Hari/Tanggal	:	Senin, 15 Juni 2026
Waktu	:	09:00-10:00 WIB
Tempat	:	Ruang Seminar & Sidang Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua	**Sekertaris**
Dr. Zulkarnaen, M.Si	Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP 196402081988101001	NIP 198805072014041002
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Prof. Dr. H. Martoyo, M.A	Dra. Herilasti Pujiningsih, M.M
NIP 196010031986031004	NIP 196809171987022001

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas. Penelitian ini menggunakan teori aksesibilitas menurut Bhat et.al (2000) dalam Kurniawan dan Arenawati (2024), yang membagi aksesibilitas ke dalam empat kategori, yaitu keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan estetika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) aspek keamanan fasilitas publik di Kabupaten Melawi belum terpenuhi secara optimal karena ketersediaan jalur landai, pegangan tangan, jalur pemandu, penerangan, dan rambu keselamatan masih terbatas; (2) aspek kemudahan belum terpenuhi secara optimal karena fasilitas ramah disabilitas, akses bangunan, layanan publik, serta pendataan dan perencanaan yang inklusif masih terbatas, sehingga penyandang disabilitas masih memerlukan bantuan; (3) aspek kenyamanan belum terpenuhi secara optimal karena ruang pelayanan yang sempit, sarana pendukung yang terbatas, serta fasilitas yang belum aksesibel, sehingga menghambat aktivitas, mobilitas, dan kemandirian penyandang disabilitas; dan (4) aspek estetika belum terpenuhi secara optimal karena penataan ruang yang kurang tertata, desain yang masih sederhana, serta belum menerapkan prinsip terbuka, sehingga lingkungan terlihat kurang representatif. Saran dalam penelitian Dinas Sosial Kabupaten Melawi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Melawi meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas agar fasilitas publik dapat diakses secara lebih mudah, aman, nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Fasilitas Publik, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

The aim of this thesis is to describe the government's role in fulfilling the rights of persons with disabilities, particularly in the provision of disability-friendly public service facilities. The research employed the accessibility theory proposed by Bhat et al. (2000), as cited in Kurniawan and Arenawati (2024). This theory categorizes accessibility into four dimensions: safety, convenience, comfort, and aesthetics. This research uses a descriptive qualitative approach. The findings show that: (1) the safety aspect of public facilities in Melawi Regency has not been optimally fulfilled, as the availability of ramps, handrails, guiding paths, adequate lighting, and safety signs remains limited; (2) the convenience aspect has not been optimally achieved because disability-friendly facilities, building access, public services, and inclusive data collection and planning are still inadequate, causing persons with disabilities to continue relying on assistance from others; (3) the comfort aspect has not been optimally fulfilled due to limited service space, inadequate supporting facilities, and inaccessible infrastructure, which hinder the activities, mobility, and independence of persons with disabilities; and (4) the aesthetic aspect has not been optimally achieved because spatial arrangements are poorly organized, designs remain relatively simple, and open-design principles have not been fully implemented, and it has resulted in an environment that appears less representative. This research recommended that the Social Affairs Office of Melawi Regency and the Housing and Settlement Areas Office of Melawi Regency improve the provision of facilities and infrastructure for persons with disabilities so that public facilities can be accessed more easily, safely, comfortably, and in a manner that better supports their daily activities.

Keywords: Accessibility, Public Facilities, Persons with Disabilities.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Penyediaan Aksesibilitas di Kabupaten Melawi”. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yaitu : Fasilitas di Taman Kota Nanga Pinoh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Melawi, belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai regulasi nasional. Masih terdapat hambatan fisik seperti tidak tersedianya jalur landai, *guiding block* dan fasilitas sanitasi khusus disabilitas dan Penyediaan fasilitas umum dan pelayanan publik yang ramah disabilitas oleh pemerintah daerah masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori aksesibilitas menurut Bhat et.al (2000) dalam Kurniawan dan Arenawati (2024), yang membagi aksesibilitas ke dalam empat kategori, yaitu keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan estetika. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling.* Para informan di dalam penelitian ini keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) orang, 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, 2) Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Melawi, 3) Tokoh Komunitas Penyandang Disabilitas ALMA Kabupaten Melawi, dan 4) Enam penyandang disabilitas yang tinggal di Kabupaten Melawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) aspek keamanan fasilitas publik di Kabupaten Melawi belum terpenuhi secara optimal karena ketersediaan jalur landai, pegangan tangan, jalur pemandu, penerangan, dan rambu keselamatan masih terbatas, sehingga meningkatkan risiko bagi penyandang disabilitas; (2) aspek kemudahan belum terpenuhi secara optimal karena fasilitas ramah disabilitas, akses bangunan, layanan publik, serta pendataan dan perencanaan yang inklusif masih terbatas, sehingga penyandang disabilitas masih memerlukan bantuan; (3) aspek kenyamanan belum terpenuhi secara optimal karena ruang pelayanan yang sempit, sarana pendukung yang terbatas, serta fasilitas yang belum aksesibel, sehingga menghambat aktivitas, mobilitas, dan kemandirian penyandang disabilitas; dan (4) aspek estetika belum terpenuhi secara optimal karena penataan ruang yang kurang tertata, desain yang masih sederhana, serta belum menerapkan prinsip inklusif, sehingga lingkungan terlihat kurang representatif.

Saran dalam penelitian ini Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Melawi perlu meningkatkan koordinasi, pendataan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas melalui pembangunan fasilitas publik yang aman, mudah diakses, nyaman, dan tertata dengan baik. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui perencanaan yang inklusif, perbaikan infrastruktur, serta pelibatan penyandang disabilitas agar fasilitas publik mampu mendukung aktivitas, mobilitas, dan kemandirian pengguna secara optimal.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	:	WETTY BRIGITHA
Nomor Mahasiswa	:	E1032221028
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam Daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 30 Mei 2026
Yang membuat pernyataan



WETTY BRIGITHA
NIM E1032221028

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

TO GOD BE THE GLORY

“*Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah***”**

Lukas 18:27

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kasih, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Bunda tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, dan dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap langkah perjalanan hidup saya.
2. Adik tersayang, yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan motivasi dalam setiap proses yang saya jalani.
3. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga karya ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan dan membanggakan kalian semua.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Penyediaan Aksesibilitas di Kabupaten Melawi".

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan dalam skripsi ini, namun hal tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran. Bagi penulis, skripsi ini merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang untuk mencapai tujuan akademik dan mengembangkan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang yang diteliti.

Penulis memahami bahwa tanpa bimbingan, saran, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, tidak akan dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik. Sehubungan dengan itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Zulkarnaen M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan Usulan Penelitian.
3. Bima Sujendra S.IP., M.Si., selaku Koordinator Proram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura

Pontianak dan selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan Usulan Penelitian.

4. Prof. Dr. H. Martoyo, M.A selaku Dosen penguji utama dan Dra. Herilasti Pujiningsih, M.M selaku Dosen penguji pendamping yang telah banyak memberi masukkan guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi.
5. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si. selaku selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Haunan Fachry Rohilie, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi, Staf Jurusan Ilmu Administrasi, Staf Akademik PPAPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang sudah memberikan arahan dan suport selama dalam proses belajar.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup bagi kita semua yang memerlukannya. Aamin.

Pontianak, 15 Juni 2026

WETTY BRIGITHA
NIM E1032221028

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah 10
1.3. Fokus Penelitian 11
1.4. Rumusan Masalah 11
1.5. Tujuan Penelitian 11
1.6. Manfaat Penelitian 12
1.6.1. Manfaat Teoritis 12
1.6.2. Manfaat Praktis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1. Definisi Konsep 14
2.1.1. Peran 14
2.1.2. Pemerintah Daerah 15
2.1.3. Penyandang Disabilitas 17

2.2. Landasan Teori 19
2.2.1. Teori Aksesibilitas 19
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan 27
2.4. Alur Pikir Penelitian 31
2.5. Pertanyaan Penelitian 34
BAB III METODE PENELITIAN 35
3.1. Jenis Penelitian 35
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 36
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
3.3.1. Lokasi Penelitian 38
3.3.2. Waktu Penelitian 39
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 40
3.4.1. Subjek Penelitian 40
3.4.2. Objek Penelitian 42
3.5. Teknik Pengumpulan Data 42
3.5.1. Observasi 43
3.5.2. Wawancara 43
3.5.3. Dokumentasi 45
3.6. Instrument atau Alat Pengumpulan Data 46
3.6.1. Pendoman Observasi 46
3.6.2. Panduan Wawancara 46
3.6.3. Alat Dokumentasi 47
3.7. Analisis Data 48
3.7.1. Keabsahan Data 48
3.7.2. Teknik Analisis Data 49
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN MELAWI 52
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Melawi 52
4.2. Kondisi Demografis Kabupaten Melawi 54
4.3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Melawi 55
4.4. Gambaran Umum Taman Kota Kabupaten Melawi 57

4.5. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi.....57
4.6. Kondisi Aksesibilitas Fasilitas di Kabupaten Melawi.....58
4.7. Relevansi Lokasi Penelitian.....59
BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MELAWI 62
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian.....62
5.1.1. Keamanan.....64
5.1.2. Kemudahan.....78
5.1.3. Kenyamanan.....87
5.1.4. Estetika.....96
BAB VI PENUTUP 106
6.1. Kesimpulan.....106
6.2. Saran.....108
6.3. Keterbatasan Penelitian.....110
DAFTAR PUSTAKA 112
LAMPIRAN-LAMPIRAN 116

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Melawi Menurut Kecamatan Tahun 2024.....6

3.1. Waktu Penelitian 40

4.1. Rekap Data Penyandang Disabilitas Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Melawi 53

5.1. Data Penyandang Disabilitas Mental Setiap Kecamatan Kabupaten Melawi Tahun 2025 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1.1. Tangga Akses Masyarakat di Taman Nanga Pinoh 6

1.2. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6

2.1. Alur Pikir Penelitian.....33

5.1. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No 8 Tahun 2015 Tentang Penyandang Disabilitas.....68

5.2. Rapat Evaluasi PERDA Kabupaten Melawi Bahas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 69

5.3. Rencana Anggaran Biaya RAB Mal Pelayanan Publik Kabupaten Melawi.....72

5.4. Fasilitas Sarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Taman Kota Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.....75

5.5. Kondisi Fasilitas Sarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi 104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1 Pedoman Wawancara 116

2 Pedoman Observasi 129

3 Profil Informan 131

4 Dokumentasi Penelitian 132

5 Surat Tugas Penelitian 136

6 Biodata Penulis 137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk hidup, berpartisipasi, dan menikmati fasilitas publik seperti halnya warga negara lainnya. Namun, dalam kenyataannya, kelompok ini masih sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik, fasilitas umum, pendidikan, serta ruang sosial yang inklusif. Pemerintah Indonesia telah memberikan payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, implementasi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Melawi, masih menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan semua fasilitas publik benar-benar ramah disabilitas.

Haryanto & Iriyanto (2021) menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik perlu memahami perlunya aksesibilitas dalam setiap dimensi layanan, termasuk penyediaan fasilitas fisik, layanan informasi, dan standar pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas fasilitas umum merupakan salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan,

terdapat berbagai standar teknis yang harus dipenuhi, seperti keberadaan jalur landai (*ramp*), *guiding block*, toilet ramah disabilitas, area parkir khusus, *railing*, serta papan informasi yang mudah dipahami. Standar tersebut dimaksudkan agar fasilitas publik dapat diakses secara aman, mandiri, dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Namun dalam praktiknya, masih banyak fasilitas publik di daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi dan menerapkan standar aksesibilitas tersebut. Kondisi ini tidak hanya ditemukan pada ruang terbuka publik seperti Taman Kota Nanga Pinoh, tetapi juga berpotensi terjadi pada fasilitas pelayanan administrasi pemerintahan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi serta Jalur pejalan kaki/trotoar. Padahal, kantor pelayanan publik tersebut merupakan lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk mengurus berbagai kebutuhan administratif yang bersifat mendasar, sehingga seharusnya memberikan kemudahan akses bagi semua warga tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam tingkat aksesibilitas pada taman kota dan kantor pelayanan publik tersebut sebagai bentuk evaluasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Melawi.

Selain ruang terbuka publik, kantor pelayanan publik juga memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak dasar warga negara. Salah satu kantor pelayanan yang memiliki intensitas kunjungan masyarakat cukup tinggi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Melawi, yang melayani berbagai kebutuhan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil. Sebagai fasilitas pelayanan publik yang

wajib memberikan pelayanan setara bagi seluruh masyarakat, Disdukcapil seharusnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah diterapkan baik pada Taman Kota Nanga Pinoh maupun pada kantor pelayanan publik seperti Disdukcapil Kabupaten Melawi.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Melawi menghadapi beberapa hambatan dalam memanfaatkan fasilitas publik. Hambatan tersebut bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan struktural. Secara fisik, fasilitas yang tidak ramah disabilitas menyebabkan mereka sulit mengakses area taman, seperti kurangnya jalur landai bagi pengguna kursi roda, tidak adanya guiding block untuk penyandang disabilitas netra, dan minimnya papan petunjuk yang inklusif. Secara sosial, minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fasilitas inklusif turut memperburuk kondisi tersebut, sementara secara struktural, kurang optimalnya implementasi kebijakan daerah menjadi penghambat utama terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Melawi memiliki peran strategis dalam memastikan fasilitas publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Peran tersebut tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga penyusunan kebijakan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dan penyandang disabilitas sendiri. Adanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIM) seharusnya menjadi motor koordinasi dalam memastikan pembangunan fasilitas umum yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keterbatasan anggaran, minimnya data akurat

terkait jumlah penyandang disabilitas, serta masih rendahnya prioritas pembangunan inklusif sering menjadi alasan tersendatnya pemenuhan hak tersebut.

Dalam konteks pelaksanaan di daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2015 menjadi dasar hukum utama yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Melawi dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah. Perda ini secara tegas mengatur tentang aksesibilitas fisik dan nonfisik dalam Bab VI Pasal 23-26, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti jalur landai (ramp), toilet khusus, marka jalan, tanda suara bagi tunanetra, serta informasi layanan dalam format yang mudah diakses. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa aksesibilitas merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya pelayanan publik yang inklusif di Kabupaten Melawi.

Namun, meskipun Perda tersebut telah berlaku sejak tahun 2015, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek penyediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas. Banyak fasilitas umum di Kabupaten Melawi yang belum memenuhi standar aksesibilitas, seperti ketiadaan ramp di gedung publik, toilet khusus, maupun jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran daerah, kurangnya

koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), serta minimnya pemahaman aparatur terhadap prinsip desain universal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Melawi (2024) mencatat jumlah total penduduk Melawi mencapai 243.250 jiwa, dengan proporsi penduduk disabilitas (berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas) sekitar 2,4 persen dari total penduduk atau sekitar 5.700 orang. Angka ini menunjukkan bahwa ribuan warga di Melawi membutuhkan fasilitas publik yang aksesibel untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti mengurus administrasi, berobat, atau bersekolah (BPS Melawi, 2024).

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Melawi Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Sokan	19.856
2	Tanah Pinoh	20.096
3	Tanah Pinoh Barat	15.940
4	Sayan	20.294
5	Belimbing	25.409
6	Belimbing Hulu	11.406
7	Nanga Pinoh	59.612
8	Pinoh Selatan	12.525
9	Pinoh Utara	16.444
10	Ella Hilir	19.799

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi, 2026

Masih banyak fasilitas publik yang belum memenuhi standar aksesibilitas karena rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, keterbatasan dalam perencanaan fasilitas publik, serta kurangnya perhatian terhadap prinsip aksesibilitas. Kondisi tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas belum dapat memanfaatkan fasilitas publik

secara optimal dan mandiri (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018). Upaya koordinasi antar-OPD di Kabupaten Melawi mulai ditingkatkan sejak adanya evaluasi dan harmonisasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 pada tahun 2023-2024 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan memperbarui substansi perda agar lebih sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya dalam memperkuat aspek penyediaan fasilitas publik yang inklusif dan aksesibel. Meski demikian, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa masih banyak wilayah, terutama di luar ibu kota kabupaten, yang belum memiliki fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur landai, rambu khusus, atau sarana transportasi umum yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas.



Gambar 1.1 Tangga Akses Masyarakat di Taman Nanga Pinoh
Sumber: Dokumentasi penulis, 2025



Gambar 1.2 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber: Dokumentasi penulis, 2025

Selain itu, penelitian penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan perannya dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, khususnya pada fasilitas publik yang sering digunakan masyarakat. Taman Kota Nanga Pinoh sebagai salah satu ikon Kabupaten Melawi merupakan lokasi yang tepat untuk menilai implementasi kebijakan inklusivitas. Hasil penelitian nantinya dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki dan merencanakan fasilitas publik yang lebih inklusif, serta meningkatkan kapasitas layanan yang mampu menjawab kebutuhan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam pemanfaatan fasilitas publik di Taman Kota Nanga Pinoh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi menunjukkan bahwa prinsip aksesibilitas belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam penyediaan sarana publik. Fasilitas yang tersedia masih lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat umum, sementara kebutuhan khusus penyandang disabilitas, seperti jalur landai, *handrail*, *guiding block*, dan fasilitas pendukung lainnya, belum terakomodasi secara memadai. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan, keterbatasan pengawasan, serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi fasilitas publik.

Secara konseptual, pemenuhan hak penyandang disabilitas erat kaitannya dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. Teori pemerintahan daerah menekankan bahwa pemerintah lokal memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang memadai dan non-diskriminatif. Ketika fasilitas umum tidak menyediakan akses yang layak, maka pemerintah daerah belum sepenuhnya

melaksanakan prinsip inklusivitas dan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual fasilitas di Taman Kota Nanga Pinoh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta menilai efektivitas peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Wahyu Jati pada tahun 2024 berjudul *"Analisis Peran Pemerintah dalam Memberikan Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kulon Progo"* bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah melaksanakan upaya pemenuhan hak pekerjaan melalui program pelatihan, penyaluran tenaga kerja, pemberian modal usaha, serta bekerja sama dengan LSM, meskipun masih terdapat hambatan dari kesadaran penyandang disabilitas terhadap pentingnya pendidikan dan pekerjaan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hanafi Siregar, Sismudjito, dan Bengkel Ginting pada tahun 2023 berjudul *"Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas"* bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah, upaya yang direalisasikan, serta hambatan yang ditemui dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menjelaskan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial telah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator, dan kasalitator, namun masih

menghadapi hambatan berupa keterbatasan dana, kuota bantuan tunai, serta belum adanya peraturan daerah terkait penyandang disabilitas.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Komang Ema Marsitadewi pada tahun 2022 berjudul *"Analisis Peran Pemerintah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak-Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas"* bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dan Kota Denpasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan pemerintah di kedua wilayah tersebut hampir sama, yaitu memberikan pelatihan, sosialisasi kepada penyedia lapangan pekerjaan, serta menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia pekerjaan secara manual agar hak pekerjaan dapat terpenuhi.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas masih banyak berfokus pada aspek pekerjaan dan kesejahteraan, sehingga belum secara spesifik menyoroti aspek aksesibilitas fasilitas publik. Oleh karena itu, kebaruan *(novelty)* dalam penelitian ini terletak pada analisis peran Pemerintah Daerah di Kabupaten Melawi dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang difokuskan pada aspek aksesibilitas fasilitas publik berdasarkan teori Bhat et al. (2000), yaitu keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan estetika. Penelitian ini tidak hanya menilai kebijakan secara normatif, tetapi juga mengkaji kondisi empiris di lapangan, khususnya pada fasilitas Taman Kota Nanga Pinoh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih belum memenuhi standar aksesibilitas, seperti ketiadaan jalur landai, guiding block, serta fasilitas sanitasi khusus

disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperkuat kajian sebelumnya melalui penekanan pada kesenjangan antara regulasi dan implementasi dalam penyediaan layanan publik yang benar-benar inklusif bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, latar belakang ini memperkuat alasan pentingnya dilakukan penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Melawi, terutama terkait fasilitas umum di Taman Kota Nanga Pinoh dan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Melawi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan daerah, pengembangan fasilitas publik yang lebih ramah disabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang inklusif bagi semua.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Fasilitas di Taman Kota Nanga Pinoh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Melawi, belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai regulasi nasional.
2. Masih terdapat hambatan fisik seperti tidak tersedianya jalur landai, *guiding block* dan fasilitas sanitasi khusus disabilitas.

3. Penyediaan fasilitas umum dan pelayanan publik yang ramah disabilitas oleh pemerintah daerah masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas di lapangan.

1.3. Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terarah, maka fokus penelitian ini ditetapkan pada: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui penyediaan dan pengelolaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, dengan studi kasus pada fasilitas aksesibilitas di Taman Kota Nanga Pinoh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Melawi. Dengan kata lain, penelitian berfokus pada bentuk peran pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan, kondisi fasilitas, serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik tersebut.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Mengapa peran pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Melawi, terutama dalam penyediaan fasilitas umum dan pelayanan publik?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai peneliti melalui studi yang dilakukan, baik untuk menjawab pertanyaan penelitian maupun memecahkan masalah yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak

penyandang disabilitas, khususnya dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, kebijakan publik, dan studi disabilitas. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik terkait implementasi kebijakan inklusivitas pada fasilitas publik di tingkat daerah.

1.6.2. Manfaat Prakits

a. Bagi Pemerintah Daerah

   Memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam memperbaiki, merencanakan, dan mengembangkan fasilitas umum dan pelayanan publik yang ramah disabilitas.

b. Bagi Penyandang Disabilitas

   Memberikan gambaran mengenai hak-hak mereka terhadap fasilitas umum dan pelayanan publik serta mendorong terbentuknya lingkungan yang lebih inklusif dan adil.

c. Bagi Masyarakat Umum

   Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fasilitas inklusif sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan solidaritas sosial.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan referensi dan dasar bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik serupa terkait inklusivitas, kebijakan daerah, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.